



PEMERINTAH
KABUPATEN JOMBANG

RENCANA KERJA TAHUN 2026

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JOMBANG



www.dlh.jombangkab.go.id



@dlhjombang





**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Prof. Dr. Nurcholish Madjid No. 80 Telp. (0321) 864123 Fax. -
JOMBANG

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JOMBANG
Nomor : 188/ 35 /415.34/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2026**

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, fungsi OPD serta untuk memberikan arah kebijakan, prioritas program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 dan menetapkannya dalam Keputusan Dinas Lingkungan Hidup.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan keuangan daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D);
17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, mempunyai tugas:
1. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026;
 2. Mengadakan koreksi dan perbaikan atas hasil pekerjaan tim baik pada sistematika dokumen, tahapan penyusunan maupun pelaporan penulisan;
 3. Memberikan kontribusi pemikiran secara aktif terhadap penyempurnaan pekerjaan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026;
 4. Memastikan konsistensi dan arah pekerjaan berdasarkan kerangka acuan kerja yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dimaksud Diktum PERTAMA berpedoman pada ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Membebaskan segala pembiayaan pelaksanaan kegiatan Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 08 Januari 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JOMBANG



MIFTAHUL ULUM, S.T, M.Si
Pembina Tingkat 1
NIP. 19710117 200112 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 188/ 35 /415.34/2025
TANGGAL : 08 Januari 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2026**

NO	JABATAN	KETERANGAN
1	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
2	Sekretaris	Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup,
3	Anggota	a. Plt. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup b. Kepala Bidang Konservasi Lingkungan c. Kepala Bidang Tata Lingkungan d. Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan e. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan RTH. f. Kasubag Keuangan dan Asset g. Kasubag Umum dan Kepegawaian h. Ka UPT Laboratorium Lingkungan Hidup i. Ka. UPT Pengelolaan Sampah j. Seluruh Fungsional Dinas Lingkungan Hidup k. Staf Penyusunan Program dan Evaluasi

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 08 Januari 2025



KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JOMBANG

MIFTAHUL ULUM, S.T, M.Si
Pembina Tingkat 1
NIP. 19710117 200112 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan hidayah-Nya maka Penyesuaian Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2026 dapat terselesaikan dengan baik.

RPJMN 2025-2029 merupakan tahap pertama pembangunan dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, serta RKP 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2025-2029. RKP 2025 dan RPJMN 2025-2029 merupakan fondasi penting dalam mencapai sasaran dan target RPJPN 2025-2045, menuju Visi Indonesia Emas 2045. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025-2029 telah tersusun sehingga setiap tahun dilakukan penyusunan Rencana Kerja sehingga Dinas Lingkungan Hidup melakukan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2026. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 memuat tentang evaluasi dan analisis kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jombang tahun 2026 telaahan terhadap Program Nasional terkait Bidang Lingkungan Hidup, serta program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target dan indikatif anggaran untuk tahun 2026.

Terimakasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dan bekerja sama dalam penyusunan buku ini. Semoga Buku Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2026 bermanfaat sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2026.

Jombang, Agustus 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Jombang



MIFTAHUL ULUM, S.T, M.Si

Pembina Tingkat 1
NIP. 19710117 200112 1 003

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. LATAR BELAKANG	1
	1.2. LANDASAN HUKUM	2
	1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	4
	1.3.1. MAKSUD	4
	1.3.2. TUJUAN	4
	1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024	
	2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024 DAN CAPAIAN RENSTRA PD	7
	2.2. ANALISIS KINERJA SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	17
	2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP	23
	2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	26
	2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT .	38
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
	3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	41
	3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	46
	3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN	48
BAB IV	PENUTUP	67

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra DLH Kabupaten Jombang Tahun 2024.....	9
TABEL 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2024	17
TABEL 2.3	Review Rancangan awal RKPD Tahun 2026 Kab. Jombang.....	27
TABEL 2.4	Usulan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026	39
TABEL 3.1	Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026.....	43
TABEL 3.2	Rancangan Renja SKPD Tahun 2026 Usulan Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Indikatif Anggaran Dinas Lingkungan Hidup	60

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang tahun 2025-2029 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang tahun 2025-2029. Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis OPD (Renstra OPD).

Renja disusun dengan memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Indikator beserta Target Program dan Kegiatan, serta pagu indikatif selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang tahun 2026 yang memuat Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, isu strategis dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Jombang yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 juga merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024-2026 yang mengacu pada RPD Kabupaten Jombang tahun 2024-2026.

Penyusunan RKPD Tahun 2025 merupakan Tahun Kedua dari Penjabaran Rencana Pembangunan Daerah Jombang Tahun 2024 - 2026 dengan rangkaian

pelaksanaan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah di Kabupaten Jombang, sesuai dengan Tujuan Pembangunan. Visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, dalam upaya untuk mewujudkannya diperlukan dasar-dasar transformasi yang kuat. Tahapan pembangunan 2025-2029 sangat strategis untuk meletakkan dasar-dasar transformasi dan bahkan menjadi basis untuk tingkat pertumbuhan pada tahapan berikutnya, (sekaligus) menjadi window opportunity untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas tahun 2045. Tema RKP pada tahun 2025 adalah **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Merujuk pada penyesuaian tema pembangunan nasional tersebut, maka tema pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2025 disesuaikan pula, menjadi **“Penguatan Daya Saing SDM dan Ekonomi Melalui Hilirisasi Agrobisnis”**, dengan mengusung 3 (tiga) prioritas pembangunan daerah tahun 2024 yaitu :

1. Peningkatan Kualitas SDM, Pemenuhan Layanan Dasar dan Kehidupan Yang Harmonis;
2. Peningkatan Layanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas;
3. Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan Dan Merata.

Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Jombang nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang menjadikannya sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara

- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Prubahan Kedua Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D);
 16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jomban (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 1/E);
 17. Surat Edaran Bupati Jombang Nomor : 000.7/783/415.01/2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Rencana Kerja Perangkat daerah (Renja) PD Tahun 2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. MAKSUD

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2026 mempunyai maksud:

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang pengelolaan lingkungan, sehingga tujuan, program dan sasaran kegiatan tahun 2026 yang telah ditetapkan dapat tercapai;

- b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, analisis, monitoring, dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
- c. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan;
- d. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan.

1.3.2. TUJUAN

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2026 adalah:

- a. Menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
- b. Menjadi pedoman pengelolaan lingkungan hidup secara tepat dan terencana sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. Mewujudkan sikap tanggap terhadap isu-isu lingkungan yang berkembang;
- d. Mengembangkan sikap dan tindakan sebagai bentuk pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan;
- e. Mengembangkan pemikiran dalam menyikapi persoalan-persoalan lingkungan sebagai upaya pengendalian dan pemulihan;
- f. Mengembangkan pemikiran yang berorientasi pada masa depan;
- g. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan lingkungan;
- h. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2025 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DANKEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jombang
- 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2024 adalah tahun pertama pelaksanaan Renstra 2024-2026 dengan Arah Kebijakan “**Meningkatkan daya dukung infrastruktur berkelanjutan yang mendorong industri agribisnis dan pembangunan wilayah**”. Berdasarkan perumusan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Tema pembangunan tersebut, maka pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut dilakukan oleh masing-masing Bidang, Seksi dan UPT sebagaimana susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 79 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang tahun 2024 dalam upaya mewujudkan tujuan Dinas Lingkungan sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026 adalah :

- a. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman, dimana sebagai indikator tercapainya sasaran ini adalah:
 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang terbagi kedalam sub indeks penyusun IKLH yakni Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL)
- b. Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan, dimana sebagai indikator tercapainya sasaran ini adalah:
 - Indeks layanan pengelolaan persampahan
- c. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana sebagai indikator tercapainya sasaran ini adalah:
 - Nilai evaluasi AKIP Pemerintah Daerah.

Dalam mewujudkan arah kebijakan dan sasaran di dalam Renstra tersebut, telah direalisasikan kedalam 8 Program dan 16 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan pada tahun 2024. Secara keseluruhan capaian kinerja organisasi pada tahun 2024 sudah berhasil mencapai 101,84% dengan serapan anggaran sebesar 94,10%. Berbagai upaya perlindungan, pencegahan pencemaran, pengendalian kualitas, maupun konservasi dan perbaikan kualitas lingkungan telah dilaksanakan sesuai rencana aksi dan perjanjian kinerja yang telah dibuat pada awal tahun. Namun laju degradasi lingkungan lebih cepat dibandingkan segala upaya yang telah dilakukan.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis diuraikan dalam tabel 2.1. Capaian kinerja dan penyerapan anggaran yang dievaluasi adalah tahun 2024 karena merupakan tahun pertama Renstra 2024-2026.

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA DLH
KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023/4			Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
							Target Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10 / 4)					
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	8,51	persen	0	persen	3,19	persen	5,32	persen	167%	3,19	persen	5,32	62,51%
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah aktivitas yang mendukung kegiatan pencegahan pencemaran kerusakan lingkungan yang dilakukan	4	kegiatan	0	kegiatan	4	kegiatan	4	kegiatan	100%	4	kegiatan	4	100,00%
2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	55	lokasi	0	lokasi	55	lokasi	55	lokasi	100%	55	lokasi	55	100,00%
2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	6	dokumen	0	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1	dokumen	1	16,67%
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	5	dokumen	0	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100%	2	dokumen	2	40,00%
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1860	dokumen	0	dokumen	620	dokumen	820	dokumen	132%	620	dokumen	820	44,09%
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1. Jumlah lokasi pemulihan LB3	9	lokasi	0	lokasi	1	lokasi	1	lokasi	100%	1	lokasi	1	11,11%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023/4			Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
			Target	Unit	Realisasi	Unit	Target Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		2. Luas lahan yang ditangani untuk pemulihan pencemaran (Konservasi)	5,86	ha	0	ha	2	ha	3,902	ha	210%	2	ha	3,902	66,59%
2.11.03.2.03.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	3	kegiatan	0	kegiatan	1	kegiatan	1	kegiatan	100%	1	kegiatan	1	33,33%
2.11.03.2.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	3	kegiatan	0	kegiatan	1	kegiatan	1	kegiatan	100%	1	kegiatan	1	33,33%
2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	3	kegiatan	0	kegiatan	1	kegiatan	1	kegiatan	100%	1	kegiatan	1	33,33%
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Penambahan luas tutupan lahan	100	persen	0	persen	33,33	persen	33,33	persen	100%	33,33	persen	33,33	33,33%
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luasan tutupan RTH (RTH Perkotaan + Taman Kehati)	2,25	Ha	0	Ha	0,75	ha	0,75	ha	100%	0,75	ha	0,75	33,33%
2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1	unit	0	unit	1	unit	1	unit	100%	1	unit	1	100,00%
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	11,67	ha	0	ha	11,67	ha	11,67	ha	100%	11,67	ha	11,67	100,00%
2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	180	orang	0	orang	60	orang	60	orang	100%	60	orang	60	33,33%
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LING	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap dokumen lingkungan	100	persen	0	persen	100	persen	100	persen	100%	100	persen	100	100,00%
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbi	1. Persentase rekomendasi teknis dan Persetujuan Lingkungan yang dinilai kelayakannya	100	persen	0	persen	100	persen	100	persen	100%	100	persen	100	100,00%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023/4					Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
			Target Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10 / 4)						
		2. Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	20	persen	0	persen	20	persen	17,24	persen	86%	20	persen	17,24	86,20%	
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	9	dokumen	0	dokumen	3	dokumen	3	dokumen	100%	3	dokumen	3	33,33%	
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	315	badan usaha	0	badan usaha	105	badan usaha	120	badan usaha	114%	105	badan usaha	120	38,10%	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lokasi pendampingan yang sudah melaksanakan kegiatan lingkungan hidup	100	persen	0	persen	77,66	persen	89,5	persen	115%	77,66	persen	89,5	89,50%	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	1.Jumlah Lembaga Masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan aktif	152	lembaga	0	lembaga	126	lembaga	151	lembaga	120%	126	lembaga	151	99,34%	
		2. Jumlah kader aktif yang didampingi	70	orang	0	orang	55	orang	55	orang	100%	55	orang	55	78,57%	
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	269	lembaga	0	lembaga	246	lembaga	260	lembaga	106%	246	lembaga	260	96,65%	
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3	dokumen	0	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1	dokumen	1	33,33%	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023/4			Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
			Target Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10 / 4)					
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat	660	orang	0	orang	450	orang	500	orang	111%	450	orang	500	75,76%
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase laporan penanganan pengaduan yang diterbitkan.	200	persen	0	persen	100	persen	100	persen	100%	100	persen	100	50,00%
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	200	persen	0	persen	100	persen	100	persen	100%	100	persen	100	50,00%
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	30	dokumen	0	dokumen	30	pengaduan	57	pengaduan	190%	30	pengaduan	57	190,00%
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
		Indeks Layanan Pengelolaan Persampahan	9,49		0		8,59				0%	8,59			0,00%
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase infrastruktur persampahan yang sesuai standar	100	persen	0	persen	100	persen	100	persen	100%	100	persen	100	100,00%
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penambahan infrastruktur persampahan	162	unit	0	unit	27	unit	27	unit	100%	27	unit	27	16,67%
1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	5,76	ton/hari	0	ton/hari	0,96	ton/hari	0,96	ton/hari	100%	0,96	ton/hari	0,96	16,67%
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang dikelola dengan baik di perkotaan	57,14	Persen	0	Persen	42,95	persen	45,33	persen	106%	42,95	persen	45,33	79,33%
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dikelola (penanganan + pengurangan)	93521	ton/tahun	0	ton/tahun	84.650	ton/tahun	87.695	ton/tahun	104%	84.650	ton/tahun	87.695	93,77%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023/4					Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
			Target Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10 / 4)					
2.11.11.2.01.0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	2	dokumen	0	dokumen	-	-	0	-	#VALUE!	-	-	0	0,00%
2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	42.554	ton	0	ton	300.112	ton	300.112	ton	100%	300.112	ton	300.112	705,25%
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	72073	ton	0	ton	55857	ton		ton	0%	55857	ton		0,00%
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	72087	ton	0	ton	55871	ton	55871	ton	100%	55871	ton	55871	77,50%
2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	60	unit	0	unit	52	unit	52	unit	100%	52	unit	52	86,67%
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1	kelompok	0	kelompok	1	kelompok	1	kelompok	100%	1	kelompok	1	100,00%
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	21	unit	0	unit	16	unit	16	unit	100%	16	unit	16	76,19%
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	200	persen	0	persen	100	persen	100	persen	100%	100	persen	100	50,00%
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	200	persen	0	persen	100	persen	100	persen	100%	100	persen	100	50,00%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023/4			Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
			6	dokumen	0	dokumen	2	dokumen	3	dokumen	150%	2	dokumen	3	50,00%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10 / 4)					
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	dokumen	0	dokumen	2	dokumen	3	dokumen	150%	2	dokumen	3	50,00%
2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	laporan	0	laporan	5	laporan	5	laporan	100%	5	laporan	5	33,33%
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100	persen	0	persen	100	persen	100	persen	100%	100	persen	100	100,00%
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	orang/bulan	0	orang/bulan	35	orang/bulan	34	orang/bulan	97%	35	orang/bulan	34	97,14%
2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	dokumen	0	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	100%	4	dokumen	4	33,33%
2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	laporan	0	laporan	2	laporan	2	laporan	100%	2	laporan	2	33,33%
2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaporan aset yang tersusun sesuai aturan	100	persen	0	persen	100	persen	100	persen	100%	100	persen	100	100,00%
2.11.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	laporan	0	laporan	1	laporan	1	laporan	100%	1	laporan	1	33,33%
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	100	persen	0	persen	100	persen	100	persen	100%	100	persen	100	100,00%
2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3	paket	0	paket	1	paket	1	paket	100%	1	paket	1	33,33%
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	persen	0	persen	100	persen	100	persen	100%	100	persen	100	100,00%
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	paket	0	paket	1	paket	1	paket	100%	1	paket	1	33,33%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023/4					Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
			Target Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Realisasi Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10 / 4)					
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	paket	0	paket	2	paket	2	paket	100%	2	paket	2	33,33%
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	paket	0	paket	4	paket	4	paket	100%	4	paket	4	33,33%
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	paket	0	paket	2	paket	2	paket	100%	2	paket	2	33,33%
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	6	dokumen	0	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100%	2	dokumen	2	33,33%
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138	laporan	0	laporan	73	laporan	101	laporan	138%	73	laporan	101	73,19%
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Disediakan	100	persen	0	persen	100	persen	100	persen	100%	100	persen	100	100,00%
1.04.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	300	unit	0	unit	100	unit	100	unit	100%	100	unit	100	33,33%
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100	persen	0	persen	100	persen	100	persen	100%	100	persen	100	100,00%
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	laporan	0	laporan	36	laporan	36	laporan	100%	36	laporan	36	1200,00%
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	laporan	0	laporan	1	laporan	1	laporan	100%	1	laporan	1	33,33%
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	persen	0	persen	100	persen	100	persen	100%	100	persen	100	100,00%
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3	unit	0	unit	1	unit	1	unit	100%	1	unit	1	33,33%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023/4			Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
			Target Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10 / 4)					
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	81	unit	0	unit	27	unit	27	unit	100%	27	unit	27	33,33%
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6	unit	0	unit	2	unit	2	unit	100%	2	unit	2	33,33%
2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	60	unit	0	unit	80	unit	80	unit	100%	80	unit	80	133,33%

2.2 ANALISIS KINERJA SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Bidang Lingkungan Hidup tidak dicantumkan lagi di dalamnya karena bukan merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026, memuat Tujuan, Sasaran dengan Indikator dan Target yang harus dipenuhi dalam 3 tahun masa pemerintahan. Dalam perbup tersebut disebutkan bahwa salah satu sasaran Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 adalah Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman dengan dua indikator, yaitu Indeks Infrastruktur Permukiman dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Dalam rangka mewujudkan IKLH agar sesuai target yang telah tercantum dalam RPD, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang menetapkan tiga sasaran strategis dengan lima indikator. Tabel dibawah ini menunjukkan capaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jombang pada tahun 2024.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	% Capaian
1	2		3	4	5
Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan TutupanLahan	1	Indeks Kualitas Air (IKA)	52,5	54	102,86%
	2	Indesk Kualitas Udara (IKU)	82	86,04	104,93%
	3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	44,6205	44,43	99,57%
Meningkatnyapelayananpe ngelolaanpersampahan	4	Indeks Layanan Pengelolaan Persampahan	8,88	9,04	101,80%
MeningkatnyaKualitasAkunt abilitasPemerintah	5	Nilai Evaluasi SAKIP	81	81,03	100,04%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023					101,84%

Sumber :Buku Laporan Kinerja InstansiPemerintah (LKjIP) DLH Tahun 2024

Capaian kinerja sasaran pada tahun 2024 secara keseluruhan mencapai 101,84%. Pencapaian kinerja sasaran tersebut merupakan hasil dari pencapaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan. Pada tahun 2024 terdapat 8 program, 16 kegiatan dan 42 sub kegiatan guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Target kinerja sasaran secara keseluruhan telah tercapai.

Sasaran Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan memiliki 3 indikator, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung menggunakan Indeks Pencemaran (IP) dengan mempertimbangkan segmen hulu, tengah dan hilir Daerah Aliran Sungai (DAS). Sedangkan Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Indeks ini biasa digunakan oleh badan pemerintah untuk memperlihatkan seberapa buruk kualitas udara di suatu daerah. Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan penyempurnaan dari Indeks Tutupan Hutan. Pada IKL ditambahkan tutupan semak belukar dan belukar rawa yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, danau dan pantai, lereng >25%, Ruang terbuka hijau, kebun raya, dan taman keanekaragaman hayati.

Indikator Indeks Kualitas Air (IKA) mencapai 54,00 poin dari target 52,50 poin. Indikator IKA telah melebihi target kinerja, dengan capaian kinerja sebesar 102,86%. Indikator ini diukur berdasarkan hasil uji kualitas badan air (air sungai), yang ditentukan dengan kriteria sungai tersebut lintas kecamatan atau sungai prioritas untuk dikendalikan pencemarannya. Pada tahun 2024 lokasi pengambilan sampel air sungai masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu fokus pada 5 (lima) sungai besar yang melintasi Kabupaten Jombang, yaitu Sungai Jarak, Sungai Marmoyo, Sungai Rejoagung, Sungai Konto Surabaya dan Sungai Brantas. Titik-titik pengambilan sampel air sungai tersebut terdiri dari tiga titik, yaitu hulu, tengah dan hilir serta diambil dua kali dalam satu tahun, yaitu pada musim penghujan dan musim kemarau. Selain sampel yang diambil sendiri oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, juga terdapat 2 titik lainnya di Sungai Brantas yang diambil oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jatim. Seluruh titik tersebut masuk kedalam komponen perhitungan IKA pada tahun 2024. Target pengambilan sampel oleh DLH Kabupaten Jombang sebanyak 15 titik setiap

musim, sehingga selama tahun 2024 telah dilakukan uji kualitas air sungai sebanyak 30 kali. Selain 30 sampel yang dilakukan uji oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, terdapat 4 sampel yang diambil oleh KLHK dan DLH Provinsi Jatim, sehingga total Badan Air yang dipantau kualitasnya untuk menentukan IKA sebanyak 34 sampel (titik).

Parameter yang digunakan untuk pengukuran kualitas air sebanyak 8 parameter yaitu Total Suspended Solid (TSS), Power of Hydrogen (pH), Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Dissolved Oxygen (DO), Nitrat (NO₃-), Total Fosfat dan Fecal Coliform. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran (SE) Ditjen Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 pada tanggal 4 Desember 2020 tentang Metode Perhitungan IKLH 2020-2024. Mutu air sungai yang diuji ditentukan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan mengklasifikasikan sungai-sungai tersebut dalam mutu air kelas 2. Berdasarkan rumus perhitungan IKA yang telah ditentukan, nilai IKA Kabupaten Jombang pada tahun 2024 sebesar 54,00 atau masuk dalam bobot indeks TERCEMAR RINGAN. Hasil uji kualitas lingkungan yang telah dilaksanakan pada Badan Air menunjukkan bahwa bobot indeks tercemar ringan tersebut disebabkan kehadiran senyawa pencemar yang berasal dari air limbah domestik, serta air hujan yang tercampur dengan air limbah. Hal ini terlihat dari tingginya konsentrasi BOD, COD, Total Fosfat, pH dan Fecal Coliform di aliran sungai Kabupaten Jombang. Hal ini banyak dipengaruhi oleh limbah rumah tangga yang belum terolah dengan baik serta limbah pertanian yang masuk ke badan air. Selain itu juga terdapat kontribusi dari industri (pabrik) terhadap tingginya tingkat pencemaran sungai. Dari 34 sampel yang diambil, hanya 7 sampel yang hasilnya memenuhi baku mutu, sedangkan 27 sampel berstatus cemar ringan.

Indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) mencapai 86,04 poin dari target 82 poin atau capaian kinerjanya sebesar 104,93%. Indikator ini dihitung berdasarkan hasil uji kualitas udara Ambient yang telah dilaksanakan selama tahun 2024. Pemantauan kualitas udara ambient di Kabupaten Jombang dilakukan dengan metode passive sampler. Passive sampler merupakan salah satu metode yang digunakan untuk

pengukuran kualitas udara ambient dengan menggunakan parameter ukur SO₂ dan NO₂. Lokasi pengambilan passive sampler yang dilaksanakan oleh DLH dilakukan di 20 (dua puluh) titik yang tersebar di wilayah Kabupaten Jombang yang mewakili kondisi kawasan komersil (perkantoran yang tidak berpengaruh langsung transportasi), pemukiman padat penduduk (urban background), daerah/kawasan industri dan daerah padat transportasi (jalan utama yang lalu lintasnya padat). Berdasarkan kriteria di atas, sampel udara ambient, diambil di Kecamatan Bareng (mewakili Jombang Selatan), Kecamatan Mojoagung (mewakili Jombang Timur), Kecamatan Ploso (mewakili Jombang Utara) dan Kecamatan Perak (mewakili Jombang Barat) serta di Kecamatan Jombang (mewakili Jombang Tengah). Sedangkan pada masing-masing kecamatan diambil 4 lokasi sesuai kriteria di atas. Upaya pengambilan sampel udara ambient pada lima penjuru mata angin pada musim hujan dan musim kemarau tersebut dilakukan agar hasilnya dapat merepresentasikan kondisi kualitas lingkungan di Kabupaten Jombang secara keseluruhan. Sehingga total uji kualitas udara ambient yang dilaksanakan DLH sepanjang tahun 2024 adalah 40 kali. Dari hasil uji kualitas udara ambient yang dilakukan sebanyak 40 kali, diketahui bahwa kondisi udara ambient di Kabupaten Jombang masih termasuk kategori baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji pada 20 lokasi berbeda selama musim penghujan dan musim kemarau dengan menggunakan parameter sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Selain data dari 40 sampel yang dilakukan uji oleh DLH, perhitungan IKU juga memperhitungkan hasil uji dari 8 sampel yang dilakukan uji oleh KLHK. Dengan demikian jumlah sampel yang diambil untuk perhitungan IKU sebanyak 48 sampel. Dengan angka 86,04 poin tersebut, maka Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Jombang masuk dalam kategori **BAIK**.

Indeks Kualitas Lahan (IKL) mencapai 44,43 poin dari target 44,6205 poin. Dengan demikian, capaian kinerjanya sebesar 99,57%. Indikator ini dihitung berdasarkan penjumlahan hutan tanaman, belukar dalam kawasan hutan, belukar dalam kawasan berfungsi lindung, RTH, taman kehati dan Rehabilitasi Hutan Lahan (RHL) dan tutupan vegetasi relevan lainnya di Kabupaten Jombang hingga tahun 2024. Hasil penjumlahan tersebut dikalikan dengan koefisien, kemudian dibagi dengan luas wilayah Kabupaten Jombang. Selanjutnya dihitung berdasarkan rumus IKL yang telah

ditetapkan sesuai dengan Surat Edaran (SE) Ditjen Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 pada tanggal 4 Desember 2020 tentang Metode Perhitungan IKLH 2020-2024. Perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL) di Kabupaten Jombang tahun 2024 sebesar 44,43 poin. Apabila dilihat berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, angka IKL Kabupaten Jombang masih dalam kategori KURANG. Target kinerja IKL tidak tercapai disebabkan adanya kebakaran hutan di Kecamatan Wonosalam yang cukup luas. Pada Oktober 2023, terjadi kebakaran hutan di Desa Panglungan, Desa Carangwulung dan Desa Jarak Kecamatan Wonosalam. Kebakaran hutan ini cukup luas, mencapai 300 ha lahan. Sedangkan perhitungan IKL pada tahun 2024 berdasarkan foto citra satelit pada tahun 2023. Sesuai dengan foto citra satelit, maka luasan tutupan vegetasi menjadi berkurang karena adanya kebakaran hutan tersebut. Karena foto citra satelit ini merupakan faktor penentu terbesar, maka mengakibatkan nilai IKL tidak sesuai target. Nilai IKL Kabupaten Jombang ini juga dipengaruhi oleh tersediaannya RTH (Ruang Terbuka Hijau). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan ruang terbuka hijau pada setiap dominasi penggunaan lahan di Kabupaten Jombang, yaitu ketersediaan anggaran, alokasi Ruang Terbuka Hijau dalam perencanaan tata ruang, implementasi rencana kerja terkait RTH, penghargaan dalam program penghijauan, pelaksana program, partisipasi masyarakat, pengaruh tokoh masyarakat, keberadaan komunitas hijau, daya serap pohon terhadap CO₂, ketersediaan lahan, nilai lahan, dan pengawasan pengendalian tata guna lahan.

Sasaran Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Persampahan memiliki satu indikator, yaitu Indeks layanan pengelolaan persampahan. Indikator indeks layanan pengelolaan persampahan mencapai 9,04 poin dari target 8,88 poin. Dengan demikian, capaian kinerjanya mencapai 101,80 poin. Indeks layanan pengelolaan persampahan ini dihitung berdasarkan 20% dari persentase pelayanan pengelolaan sampah. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah, tugas Pemerintah Daerah terkait pengelolaan sampah tidak lagi terbatas pada wilayah perkotaan, namun mencakup

seluruh wilayah kabupaten. Pelayanan pengelolaan sampah yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang melalui Dinas Lingkungan Hidup meliputi pelayanan penanganan sampah dan pengurangan sampah. Pada tahun 2024, pelayanan penanganan sampah yang dilaksanakan oleh DLH pada 18 Kecamatan dari total 21 Kecamatan di Kabupaten Jombang. Pada 18 Kecamatan yang sudah terlayani sudah didirikan TPS/TPS 3R dan sudah dilayani pengambilan oleh kendaraan pengangkut sampah yang mengangkut sampah secara berkala dari TPS/TPS 3R ke TPA. Total tenaga kebersihan pada tahun 2024 adalah sebanyak 313 orang dan jumlah TPS sebanyak 78 unit serta jumlah TPS3R sebanyak 27 unit. Sedangkan jumlah armada angkut berupa amroll sebanyak 17 unit, dump truck sebanyak 2 unit dan compactor sebanyak 3 unit, serta 33 unit kendaraan roda 3. Pada tahun 2024 telah dibangun 3 unit TPS3R baru beserta sarprasnya dalam rangka mendukung upaya pengurangan sampah. Selain itu juga dilaksanakan pembinaan terhadap sekolah-sekolah dan desa binaan serta para pelaku usaha. Total sampah yang sudah tertangani pada 2024 adalah 57.456,47 ton/tahun dan total sampah yang dikurangi sebesar 30.046,93 ton/tahun. Sehingga total pengelolaan sampah selama tahun 2024 sebesar 87.503,40 ton/tahun. Sedangkan jumlah timbulan sampah di Kabupaten Jombang pada tahun 2024 sebesar 193.583,44 ton/tahun. Maka sampah yang terkelola sebesar 45,20% dari target 44,44%. Meskipun target kinerja telah terlampaui, namun sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 32 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Jombang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, target penanganan sampah adalah sebesar 70% dari timbulan sampah dan target pengurangan sampah adalah 30% dari timbulan sampah. Target tersebut harus dapat dicapai pada tahun 2025.

Sasaran Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Pemerintah memiliki satu indikator, yaitu nilai evaluasi SAKIP dengan target mendapatkan kategori A dengan nilai 81 poin. Penilaian SAKIP yang dilaksanakan pada tahun 2024 memberikan nilai akhir 81,03 (kategori A). Dengan demikian target kinerja telah terlampaui dengan capaian kinerja sebesar 100,04%.

Keberhasilan pencapaian target sasaran di atas tidak luput dari keberhasilan pelaksanaan Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan pada tahun 2024. Dari 8 program,

16 kegiatan dan 42 Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024, seluruhnya telah mencapai target, bahkan banyak yang melebihi target. Keseluruhan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan mendukung keberhasilan pencapaian sasaran. Uraian di bawah ini menjabarkan keterkaitan sasaran dengan program, kegiatan serta sub kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan tahun 2024 dapat diketahui bahwa kualitas air sungai di Kabupaten Jombang seluruhnya berada dalam status cemar ringan. Sedangkan kualitas udara ambient mengalami trend kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Permasalahan lingkungan hidup semakin kompleks dan membutuhkan penanganan yang tidak mudah. Meskipun target kinerja telah tercapai, bukan berarti penanganan permasalahan lingkungan hidup telah selesai. Berbagai hambatan dan keterbatasan selalu ada dalam upaya untuk melakukan pemantauan dan perbaikan kualitas lingkungan hidup. Beberapa hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Penurunan kualitas, kuantitas dan kontinuitas sumber daya air
2. Belum optimalnya pelayanan pengelolaan persampahan
3. Penurunan Tutupan Vegetasi
4. Belum optimalnya penyelesaian kasus LB3 kab. Jombang
5. Peningkatan bencana akibat perubahan iklim

Kendala beserta keterbatasan yang ada tentunya berdampak pada pencapaian agenda pembangunan. Agenda prioritas ke-6 dalam RPJMN adalah **Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**, yang salah satunya diwujudkan melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Visi Kabupaten Jombang 2025-2029 adalah “**Mewujudkan Jombang Maju Dan Sejahtera Untuk Semua**” dan Misi Kabupaten Jombang ada 5 (lima) dimana Dinas Lingkungan Hidup mendukung pada Misi ke-3 yaitu “**Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan**”. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai

oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang adalah Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan dengan Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) dan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS).

Dampak adanya berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi terhadap pencapaian agenda prioritas RPJMN dan Visi Misi Kepala Daerah seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Belum Optimalnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b. Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- c. Kurangnya RTH Publik sebagai bagian dari upaya pengelolaan keanekaragaman hayati
- d. Belum Optimalnya pengelolaan Sampah dan limbah B3.

Degradasi lingkungan bergerak pesat sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk berimplikasi pada tingginya tuntutan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup serta tuntutan pembangunan untuk pemukiman, fasilitas umum, dan infrastruktur lainnya. Dampak turunannya adalah semakin berkurangnya luasan ruang terbuka hijau, semakin meluasnya pembukaan lahan hutan untuk kepentingan produksi, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan pada akhirnya berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup. Pemanasan global memperparah kondisi lingkungan yang buruk, sehingga menimbulkan bencana alam di berbagai daerah.

Dalam rangka mencapai Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang diperlukan Arah Kebijakan dan Strategi yang memadai. Untuk mewujudkan sasaran strategis Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Arah Kebijakan yang dipilih adalah meningkatkan perbaikan kualitas lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas air, udara dan lahan, yang didukung oleh kapasitas pengelolaan lingkungan yang kuat, mencakup: kelembagaan, pengendalian dampak lingkungan, penegakan hukum lingkungan, dan kesadaran masyarakat, sehingga terwujud pembangunan yang ramah lingkungan serta lingkungan yang bersih dan sehat. Sedangkan strategi yang dipilih adalah:

1. Penguatan sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup melalui:

- a. Penguatan mekanisme pelaksanaan dokumen lingkungan;
 - b. Peningkatan pemantauan kualitas lingkungan dan sistem informasi lingkungan hidup;
 - c. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
 - d. Penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - e. Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan;
2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui:
- a. Pengendalian pencemaran akibat limbah ke badan air dan kerusakan sumberdaya air;
 - b. Pengendalian pencemaran udara dari sektor industri;
 - c. Peningkatan upaya penurunan emisi gas rumah kaca;
 - d. Pemantauan kualitas udara ambien;
 - e. Penguatan upaya rehabilitasi lahan;
 - f. Peningkatan tutupan vegetasi;
 - g. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya;
 - i. Melindungi dan meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati dan pemanfaatan jasa lingkungan.

Sedangkan dalam rangka mencapai sasaran strategis Meningkatkan Pelayanan Pengelolaan Persampahan, Arah Kebijakan yang ditetapkan adalah melaksanakan implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga lainnya yang meliputi peningkatan kinerja pengurangan sampah dan penanganan sampah. Sedangkan Strategi yang ditetapkan adalah:

- a. Melaksanakan Norma Standar Prosedur dan Kriteria baik dalam upaya pengurangan sampah maupun penanganan sampah
- b. Peningkatan kapasitas dan kelembagaan pengelola sampah
- c. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi
- d. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif

- e. Penguatan komitmen bagi dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam ikut melakukan upaya pengurangan sampah

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPД

Rancangan awal RKPД disusun dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran OPD yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029. Selanjutnya, Renstra tersebut dijabarkan melalui Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup yang dibuat setiap tahun. Pada awal tahun 2025 telah dilakukan penyusunan Renja tahun 2025 setelah memperhatikan hasil Musrenbang dan kondisi lingkungan hidup saat itu. Berikut hasil analisis kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup dibandingkan dengan rancangan awal RKPД.

TABEL 2.3
REVIEW RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026
KABUPATEN JOMBANG

Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Rancangan Awal RKPD					Kode	Rancangan Awal RKPD					CATATAN PENTING		
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program/	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)			
2.11	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP					2.11	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP					27.241.208.821		
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Kab. Jombang	Persentase infrastruktur persampahan yang sesuai standar	100	persen	1.611.596.200	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Kab. Jombang	Persentase infrastruktur persampahan yang sesuai standar	100	persen	1.042.320.000	
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah Penambahan infrastruktur persampahan	10	unit	1.611.596.200	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah Penambahan infrastruktur persampahan	10	unit	1.042.320.000	
1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kab. Jombang	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	1,28	ton/hari	1.611.596.200	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kab. Jombang	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	1,28	ton/hari	1.042.320.000	Pembangunan 2 unit TPS3R
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Jombang	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100	persen	16.109.983.989	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Jombang	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100	persen	12.498.257.528	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100	persen	50.379.500	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100	persen	28.000.000	
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	27.488.000	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	17.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Kode	Rancangan Awal RKPD						CATATAN PENTING
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)		Program/	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan	22.891.500	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan	11.000.000	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100	persen	9.957.339.289	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100	persen	6.810.353.528	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34	orang/bulan	9.694.266.789	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34	orang/bulan	6.637.833.528	
2.11.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	Dokumen	243.630.000	2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	Dokumen	164.554.500	
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	laporan	19.442.500	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	laporan	7.965.500	
2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Persentase pelaporan aset yang tersusun sesuai aturan	100	persen	28.000.000	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Persentase pelaporan aset yang tersusun sesuai aturan	100	persen	15.000.000	
2.11.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	laporan	28.000.000	2.11.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	laporan	15.000.000	
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat	Kab. Jombang	Persentase Pemenuhan Pakaian Dinas Pegawai	100	persen	26.400.000	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat	Kab. Jombang	Persentase Pemenuhan Pakaian Dinas Pegawai	100	persen	0	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Kode	Rancangan Awal RKPD					CATATAN PENTING		
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program/	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)			
	Daerah						Daerah							
2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Jombang	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi	1	paket	26.400.000	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Jombang	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi	1	paket	0	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	persen	778.603.700	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	persen	468.629.500	
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Jombang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	76.446.100	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Jombang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	49.999.450	
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Jombang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	paket	67.202.750	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Jombang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	paket	39.487.700	
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Jombang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	paket	437.194.850	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Jombang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	paket	263.555.850	
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Jombang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	52.852.000	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Jombang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	25.006.500	
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	dokumen	2.352.000	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	dokumen	2.352.000	
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46	laporan	142.556.000	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46	laporan	88.228.000	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jombang	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100	persen	4.694.619.000	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jombang	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100	persen	4.747.823.200	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Kode	Rancangan Awal RKPD						CATATAN PENTING
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)		Program/	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	3.762.000.000	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	3.786.000.000	
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	932.619.000	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	961.823.200	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jombang	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	persen	574.642.500	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jombang	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	persen	428.451.300	
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Jombang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	40.292.500	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Jombang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	40.292.500	
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Jombang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28	Unit	443.750.000	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Jombang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28	Unit	346.598.800	
2.11.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Jombang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	80	Unit	90.600.000	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Jombang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	80	Unit	41.560.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Kode	Rancangan Awal RKPD					CATATAN PENTING			
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp)	Program/	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)		
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Jombang	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	7,43	persen	4.022.966.410	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Jombang	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	7,43	persen	1.707.733.250		
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah aktivitas uji sampel dan pengelolaan laboratorium dalam mendukung kegiatan pencegahan pencemaran kerusakan lingkungan.	2	kegiatan	3.436.463.660	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah aktivitas uji sampel dan pengelolaan laboratorium dalam mendukung kegiatan pencegahan pencemaran kerusakan lingkungan.	2	kegiatan	1.224.131.400		
		Kab. Jombang	Jumlah aktivitas penyusunan dokumen status lingkungan hidup dalam mendukung kegiatan pencegahan pencemaran kerusakan lingkungan.	1	kegiatan				Kab. Jombang	Jumlah aktivitas penyusunan dokumen status lingkungan hidup dalam mendukung kegiatan pencegahan pencemaran kerusakan lingkungan.	1	kegiatan			
		Kab. Jombang	Jumlah aktivitas rehabilitasi tanaman dalam mendukung kegiatan pencegahan pencemaran kerusakan lingkungan.	1	kegiatan				Kab. Jombang	Jumlah aktivitas rehabilitasi tanaman dalam mendukung kegiatan pencegahan pencemaran kerusakan lingkungan.	1	kegiatan			
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3	dokumen	493.193.750	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3	dokumen	199.501.250		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Kode	Rancangan Awal RKPD					CATATAN PENTING		
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp)	Program/	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	68	lokasi	127.351.250	2.11.03.2.01.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	68	lokasi	174.437.500	
2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Kab. Jombang	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	2	dokumen	206.727.500	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Kab. Jombang	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	2	dokumen	207.150.000	
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	800	dokumen	2.609.191.160	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	800	dokumen	643.042.650	
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	1. Jumlah lokasi pemulihan LB3	2	lokasi	586.502.750	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	1. Jumlah lokasi pemulihan LB3	2	lokasi	483.601.850	
		Kab. Jombang	2. Luas lahan yang ditangani untuk pemulihan pencemaran (Konservasi)	1,925	ha				Kab. Jombang	2. Luas lahan yang ditangani untuk pemulihan pencemaran (Konservasi)	1,925	ha		
2.11.03.2.03.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi	Kab. Jombang	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1	kegiatan	143.045.150	2.11.03.2.03.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi	Kab. Jombang	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1	kegiatan	94.311.500	
2.11.03.2.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	Kab. Jombang	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	3	kegiatan	226.034.600	2.11.03.2.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	Kab. Jombang	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	3	kegiatan	222.473.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Kode	Rancangan Awal RKPD					CATATAN PENTING		
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp)	Program/	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	
2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Kab. Jombang	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1	kegiatan	217.423.000	2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Kab. Jombang	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1	kegiatan	166.817.350	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kab. Jombang	Persentase Penambahan luas tutupan lahan	0,1808	persen	7.708.235.650	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kab. Jombang	Persentase Penambahan luas tutupan lahan	0,1808	persen	7.236.619.200	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Luasan tutupan RTH Perkotaan	0,15	ha	7.708.235.650	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Luasan tutupan RTH Perkotaan	0,15	ha	7.236.619.200	
			Luasan tutupan RTH Taman KEHATI	0,5	ha					Luasan tutupan RTH Taman KEHATI	0,5	ha		
2.11.04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kab. Jombang	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1	unit	179.378.400	2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kab. Jombang	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1	unit	180.761.950	
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Jombang	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	12,67	ha	7.516.577.250	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Jombang	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	12,67	ha	7.043.577.250	
2.11.04.2.01.06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	60	orang	12.280.000	2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	60	orang	12.280.000	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN	Kab. Jombang	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap dokumen lingkungan	100	persen	247.863.750	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN	Kab. Jombang	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap dokumen lingkungan	100	persen	236.898.050	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Kode	Rancangan Awal RKPD					CATATAN PENTING		
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program/	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)			
	HIDUP (PPLH)						HIDUP (PPLH)							
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	1. Persentase rekomendasi teknis yang dinilai kelayakannya	100	persen	247.863.750	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	1. Persentase rekomendasi teknis yang dinilai kelayakannya	100	persen	236.898.050	
		Kab. Jombang	2. Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	18	persen				Kab. Jombang	2. Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	18	persen		
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kab. Jombang	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	3	dokumen	146.622.500	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kab. Jombang	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	3	dokumen	146.624.300	
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Kab. Jombang	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	130	badan usaha	101.241.250	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Kab. Jombang	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	130	badan usaha	90.273.750	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Kode	Rancangan Awal RKPD					CATATAN PENTING		
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp)	Program/	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	
	Hidup						Hidup							
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kab. Jombang	Persentase lokasi pendampingan yang sudah melaksanakan kegiatan lingkungan hidup	6,46	persen	566.360.500	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kab. Jombang	Persentase lokasi pendampingan yang sudah melaksanakan kegiatan lingkungan hidup	6,46	persen	359.857.550	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	1. Jumlah Lembaga Masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan aktif	214	lembaga	566.360.500	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	1. Jumlah Lembaga Masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan aktif	214	lembaga	359.857.550	
		Kab. Jombang	2. Jumlah kader Konservasi yang didampingi	55	orang				Kab. Jombang	2. Jumlah kader Konservasi yang didampingi	55	orang		
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab. Jombang	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	dokumen	47.823.050	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab. Jombang	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	dokumen	25.175.200	
2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kab. Jombang	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat	400	orang	118.421.500	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kab. Jombang	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat	400	orang	105.856.400	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Kode	Rancangan Awal RKPD					CATATAN PENTING		
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp)	Program/	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Jombang	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas /kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	313	lembaga	400.115.950	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Jombang	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas /kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	313	lembaga	228.825.950	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Jombang	Persentase laporan penanganan pengaduan yang diterbitkan.	100	persen	82.247.500	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Jombang	Persentase laporan penanganan pengaduan yang diterbitkan.	100	persen	80.469.050	
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100	persen	82.247.500	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100	persen	80.469.050	
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	40	pengaduan	82.247.500	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	40	pengaduan	80.469.050	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kab. Jombang	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	49,35	persen	14.245.541.440	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kab. Jombang	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	49,35	persen	12.829.603.364	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Kab. Jombang	Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah	20,05	Persen/RT	14.245.541.440	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Kab. Jombang	Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah	20,05	Persen/RT	12.829.603.364	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Kode	Rancangan Awal RKPD					CATATAN PENTING		
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program/	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)			
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kab. Jombang	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1	kelompok	816.260.000	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kab. Jombang	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1	kelompok	764.344.400	
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	12	unit	1.835.516.000	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	12	unit	360.942.000	
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Kab. Jombang	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	61115,6	ton	3.826.009.750	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Kab. Jombang	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	61115,6	ton	5.202.559.450	
2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Kab. Jombang	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	54	unit	3.429.734.150	2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Kab. Jombang	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	54	unit	2.555.857.374	
2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Kab. Jombang	Jumlah sampah yang terdaur ulang	38.170,68	ton	988.476.000	2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Kab. Jombang	Jumlah sampah yang terdaur ulang	38.170,68	ton	762.907.500	
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Kab. Jombang	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	60.385,60	ton	3.349.545.540	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Kab. Jombang	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	60.385,60	ton	3.182.992.640	
			JUMLAH			44.594.795.439							35.991.757.992	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2025-2029 dan mengacu pada RKPD yang memuat tentang kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat serta dengan memperhatikan Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang baru. Usulan program dan kegiatan berasal dari pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi maupun perguruan tinggi yang merupakan hasil dari musrenbang desa, musrenbang kecamatan sampai dengan musrenbang kabupaten. Hasil Musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan APBD 2026 yang nantinya digunakan sebagai acuan penyusunan rancangan Renja Dinas Lingkungan Hidup.

Tabel 2.4

Usulan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026

No	Kegiatan	Permasalahan	Lokasi	Volume	Sumber Dana	Alasan/Keterangan
1	Penambahan Edukasi Pengelolaan Sampah	Kurangnya edukasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, sehingga perlu ditingkatkan.	Kabupaten Jombang	1 kegiatan	APBD	(Akomodir) Pada tahun 2026 akan dilakukan edukasi pengelolaan sampah oleh DLH Kab. Jombang melalui program Sekolah Adiwiyata, Eco Pesantren, Desa Berseri dan Program Kampung Iklim sehingga untuk lembaga/desa yang belum menjadi sasaran lokus secara bertahap akan menjadi lokus DLH untuk pendampingan dimana salah satunya adalah terkait edukasi pengelolaan sampah.
2	Perlunya peningkatan gerakan membawa tumbler khususnya di sekolah-sekolah dan sekolah bisa menyediakan titik refill air.	Banyak sekolah yang belum menerapkan gaya hidup minim plastik sehingga diperlukan penguatan strategu dalam pengurangan sampah.	Kabupaten Jombang	1 kegiatan	APBD	(Akomodir) Salah satu program DLH dalam upaya pengurangan sampah melalui program JOMBANG RESIK secara bertahap telah diterapkan di sekolah-sekolah melalui Program Sekolah Adiwiyata. Kolaborasi program tersebut akan ditingkatkan dalam rangka mendukung capaian optimalisasi pengurangan limbah sampah plastik.
3	Penerapan aturan berkaitan dengan reward/punishment dalam pengelolaan sampah di Desa-desa	Masih kurangnya peran pemerintah desa dalam mendukung upaya pengelolaan sampah	Kabupaten Jombang	1 kegiatan	APBD	(Belum Akomodir) Aturan terkait dengan pengelolaan sampah di kabupaten jombang telah ada yakni melalui Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Di dalam perda tersebut telah memuat ketentuan tentang Insentif pada pasal 25 dan Sanksi Administratif pada pasal 34. Namun demikian, masukan dari peserta forum akan menjadi catatan bagi DLH untuk terus memperbaiki kinerja.

Tahap selanjutnya, semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih berdasarkan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Rencana Strategis, serta isu-isu strategis yang berkembang terkait dengan lingkungan hidup. Hasil pencermatan usulan musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan Renja. Rancangan Renja tersebut selanjutnya dibahas dalam forum OPD yang dikoordinasikan oleh Bappeda. Tujuan pembahasan rancangan Renja adalah penyelarasan program dan kegiatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan, mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, serta penyesuaian pendanaan program dan kegiatan berdasarkan pagu indikatif. Berdasarkan pemilahan dan pembahasan forum OPD dan juga berpedoman pada RKPD Kabupaten, maka ditetapkan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2026 yang memuat 8 program dan 15 Kegiatan dan 41 Sub kegiatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

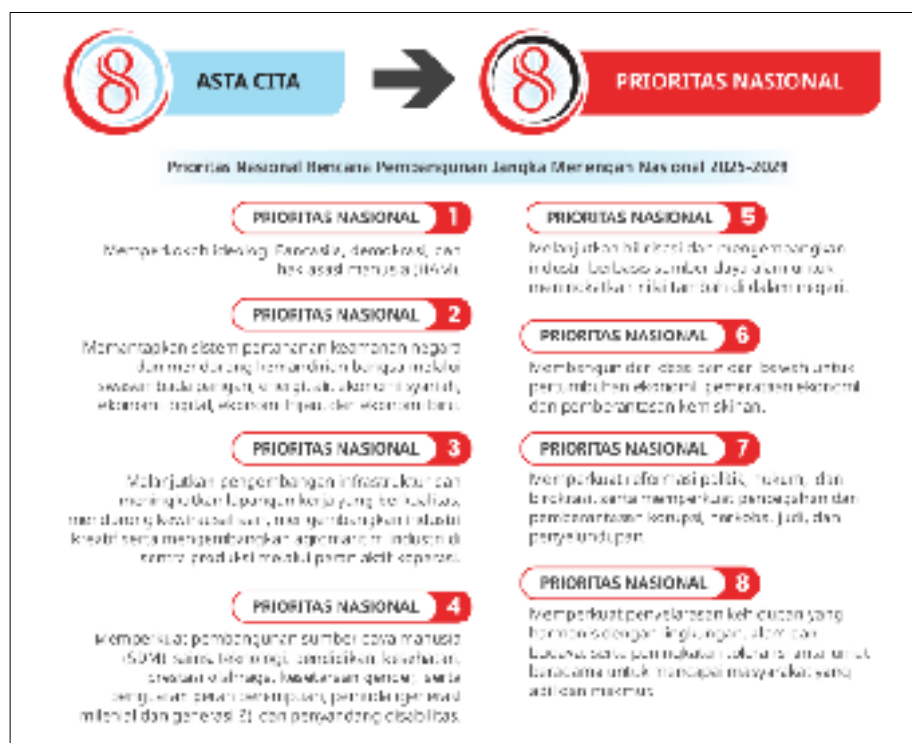
Visi Pemerintah Indonesia Tahun 2025-2029 adalah: “**Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045**”. Berdasarkan visi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam misi yang disebut sebagai Asta Cita yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/Quick Wins. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, Tema Pembangunan Nasional Tahun 2026 adalah "**Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif**".

Dari tema dan unsur-unsur pokok yang menjadi arah serta kebijakan pembangunan nasional tersebut disusun 8 (delapan) prioritas pembangunan nasional.

Gambar 3.1
Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan Nasional



Sumber : Ringkasan RPJMN 2025-2029, Bappenas

Sinkronisasi prioritas pembangunan nasional dengan isu strategis yang ada tersaji dalam matrik berikut:

Tabel 3.1
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS
1	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertahanan. 2. Swasembada pangan 3. Swasembada Energi 4. Swasembada Air 5. Ekonomi Digital 6. Peningkatan Kualitas lingkungan Hidup dan tata Ruang 7. Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir
2	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda 2. Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik 3. Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan
3	Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Hilirisasi Industri Berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor 2. Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru 3. Optimalisasi Backbone Integrasi Ekonomi dan Perkuatan Sistem Logistik Nasional
4	Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS
	dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	2. Percepatan Penyediaan Perumahan dan Permukiman

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, diolah

Sebagai instrumen utama dalam mengakselerasi transformasi ekonomi, Proyek Strategis Nasional (PSN) ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) yang termuat dalam RPJMN Tahun 2025-2029. PSN diposisikan sebagai pengungkit investasi produktif lintas sektor yang dibiayai oleh Pemerintah (APBN), serta BUMN dan sektor swasta melalui berbagai skema, termasuk KPBU dan blended finance. Arah kebijakan PSN dalam RKP Tahun 2026 mencerminkan penajaman proyek yang strategis, terukur, dan berdampak signifikan terhadap sasaran pembangunan nasional, terutama dalam mendukung Program Prioritas Presiden dan Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins). Fokus diarahkan pada percepatan peningkatan kualitas SDM, pengurangan kemiskinan, swasembada pangan dan energi, pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan, serta pemerataan pembangunan antarwilayah.

Di samping itu, terdapat sejumlah Proyek Strategis Nasional yang ditetapkan berdasarkan arahan langsung Presiden, antara lain:

1. PSN Sekolah Rakyat;
2. PSN Koperasi Merah Putih;
3. PSN Digitalisasi Pendidikan;
4. PSN Pengurangan Kemiskinan;
5. PSN Pengelolaan Sampah Terpadu.

RPJPN Tahun 2025-2045 mengamanatkan Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir sebagai salah satu transformasi super prioritas (*game changer*). Sejalan dengan itu, RPJMN Tahun 2025- 2029 juga mengamanatkan peningkatan kinerja pengelolaan sampah, termasuk target

pengolahan, perluasan layanan pengumpulan, pengendalian sampah laut, serta penguatan peran keluarga dalam perilaku peduli sampah. Tantangan besar yang dihadapi adalah proyeksi peningkatan timbulan sampah domestik nasional hingga 82,2 juta ton per tahun pada 2045, sementara kapasitas TPA diperkirakan akan melampaui batas pada 2028, dengan sejumlah TPA telah mengalami kelebihan beban. Selain itu, pengelolaan sampah menghadapi kompleksitas kewenangan lintas tingkat pemerintahan dan lemahnya tata kelola kelembagaan serta pendanaan di daerah. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan percepatan penerapan teknologi pengelolaan sampah yang efisien dan ramah lingkungan, guna mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan secara lebih luas. Indonesia saat ini menghadapi kondisi darurat sampah, yang belum mampu diatasi oleh sistem pengelolaan yang ada. Langkah percepatan berbasis teknologi sangat dibutuhkan, terutama di kota-kota besar dengan timbulan sampah tinggi dan keterbatasan lahan TPA. Salah satu strategi yang diupayakan adalah pembangunan instalasi PSEL yang juga mendukung peningkatan bauran energi terbarukan. Namun, implementasi PSEL berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 menghadapi tantangan, seperti keterbatasan pilihan teknologi (hanya berbasis *waste-to-electricity*) dengan biaya tinggi, kekhawatiran dampak lingkungan, lambatnya penyiapan lahan dan perizinan, serta rendahnya kesiapan SDM daerah. Selain itu, model bisnis yang belum terintegrasi dan ketiadaan pedoman teknis turut menghambat implementasi, di samping potensi tumpang tindih subsidi dan belum adanya standar biaya (Rp/ton) untuk evaluasi pengajuan usulan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS). Di sisi lain, tata kelola persampahan di daerah masih lemah. Budaya memilah sampah dari sumber belum terbentuk, retribusi sampah masih minim dan belum mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021, serta sebagian besar pengelolaan masih bergantung pada APBD dan hibah. Keterbatasan SDM, kurangnya kepemimpinan yang berkomitmen, serta kelembagaan yang belum terpisah antara fungsi regulator dan operator semakin memperburuk situasi. Selain itu, peran sektor informal belum terorganisasi, dan keterlibatan swasta dalam ekonomi sirkular, *Extended Producer Responsibility* (EPR), *Corporate Social*

Responsibility (CSR), maupun penyediaan teknologi dan fasilitas pengolahan sampah masih sangat terbatas. Integrasi seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Tujuan Program PSN adalah untuk :

1. Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah skala kabupaten/kota dengan teknologi yang tepat dan ramah lingkungan.
2. Menciptakan nilai tambah ekonomi dari hasil pengolahan sampah.
3. Mengurangi volume sampah kota secara signifikan.
4. Meningkatkan investasi sektor swasta dalam pengelolaan sampah.
5. Meningkatkan tata kelola persampahan.
6. Mendukung target nasional dan komitmen internasional dalam pengurangan gas rumah kaca;

Tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang disusun dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah tahun 2026, khususnya bidang lingkungan hidup. Keselarasan kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan faktor penting tercapainya tujuan pembangunan nasional.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3.2.1. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang adalah :

1. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan.

Indikator tujuan tersebut adalah

- ✓ Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan target akhir Renstra 72,71 indeks
- ✓ Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) dengan target akhir renstra sebesar 50 indeks.

3.2.2. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategi Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Jombang adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

Sebagai indikator tercapainya sasaran ini adalah

- Indeks Kualitas Air (IKA) dengan target sebesar 73,61 Poin.
- Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan target sebesar 78,48 Poin.
- Indeks Kualitas Lahan (IKL) dengan target sebesar 60,49 Poin.

yang disupport oleh beberapa program sebagai berikut :

- a. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- b. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
- d. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- e. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.

2. Meningkatnya layanan pengelolaan sampah.

Sebagai indikator tercapainya sasaran ini adalah Persentase peningkatan wilayah layanan pengelolaan sampah dengan target sebesar 29,41%, yang dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Persampahan dan Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.

3. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan Efektif

Sebagai Indikator tercapainya sasaran ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan target sebesar 84,82 Poin, yang ditentukan oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Pada tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang merencanakan 8 Program yang dijabarkan dalam 14 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2026 yang merupakan upaya mencapai Tujuan, Sasaran dalam RPD 2025-2029 dan pencapaian Tujuan dan Sasaran (Indikator Kinerja Utama) pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029.

Berikut rincian Program dan Kegiatan setelah pemutakhiran pada Rencana Kerja DLH tahun 2025.

A. Untuk menangani **Isu Strategis Penurunan kualitas dan kuantitas sumberdaya air** dilaksanakan beberapa program sebagai berikut :

1. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

Program ini memiliki indikator Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap dokumen lingkungan dengan target 100%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

- Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator :
 - a. Persentase rekomendasi teknis yang dinilai kelayakannya dengan target 100%
 - b. Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan dengan target 80%

Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

- a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
 - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 146.624.300,-
 - Keluaran : Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan
 - Target : 3 dokumen
- b. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp 90.273.750,-
 - Keluaran : Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi
 - Target : 130 Badan Usaha

2. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

Program ini memiliki indikator Persentase laporan penanganan pengaduan yang diterbitkan dengan target 100%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

- Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota memiliki indikator Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti dengan target 100%.

Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

- a. Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
 - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp 80.469.050,-
 - Keluaran : Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani
 - Target : 40 pengaduan

Untuk menangani **Isu Strategis Penurunan Tutupan Vegetasi** dilaksanakan beberapa program sebagai berikut :

➤ **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI**

Program ini memiliki indikator Persentase Penambahan luas tutupan lahan dengan target 0,1808%. Target ini berbeda dengan target pada Renstra karena menyesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

- Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota memiliki indikator :
 - i. Luasan tutupan RTH Perkotaan dengan target 0,15 Ha.
 - ii. Luasan tutupan RTH Taman KEHATI dengan target 0,5 Ha

Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

- a. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 7.277.077.250,-
 - Keluaran : Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Target : 12,67 Ha
- b. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
 - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 180.761.950,-
 - Keluaran : Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Target : 1 unit
- c. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
 - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp 12.280.000,-
 - Keluaran : Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
 - Target : 60 orang

B. Untuk menangani Isu Strategis Penurunan kualitas, kuantitas dan kontinuitas sumber daya air, Peningkatan bencana akibat perubahan iklim dan Isu Strategis Belum optimalnya penyelesaian kasus LB3 kab. Jombang dilaksanakan pada Program berikut :

1. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Program ini memiliki indikator Persentase Penurunan Emisi GRK (kumulatif) dengan target 97.705,64 Ton/CO2 Eq. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

- Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota memiliki indikator :
 - a. Jumlah aktivitas uji sampel dan pengelolaan laboratorium dalam mendukung kegiatan pencegahan pencemaran kerusakan lingkungan yang dilakukan dengan target 2 kegiatan.
 - b. Jumlah aktivitas penyusunan dokumen status lingkungan hidup dalam mendukung kegiatan pencegahan pencemaran kerusakan lingkungan yang dilakukan dengan target 1 kegiatan.
 - c. Jumlah aktivitas rehabilitasi tanaman dalam mendukung kegiatan pencegahan pencemaran kerusakan lingkungan yang dilakukan dengan target 1 kegiatan.

Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

- a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut.
 - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 174.437.500,-
 - Keluaran : Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut.
 - Target : 68 Lokasi
- b. Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
 - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 207.150.000,-

- Keluaran : Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun
 - Target : 2 Dokumen
- c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
- Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 199.496.726,-
 - Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan
 - Target : 1 Dokumen
- d. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota.
- Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 973.127.318,-
 - Keluaran : Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan
 - Target : 800 Dokumen

1.1 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota memiliki indikator :

- a) Jumlah lokasi pemulihan LB3 dengan target 1 lokasi
- b) Luas lahan yang ditangani untuk pemulihan pencemaran (Konservasi) dengan target 1,491 Ha

Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi
 - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 94.311.500,-
 - Keluaran : Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan
 - Target : 1 Kegiatan
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota
 - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 222.473.000,-
 - Keluaran : jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota

- Target : 3 Kegiatan
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi
 - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 166.817.350,-
 - Keluaran : Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan
 - Target : 1 Kegiatan

C. Untuk menangani **Isu Strategis Penurunan kualitas, kuantitas dan kontinuitas sumber daya air dan Peningkatan bencana akibat perubahan iklim** dilaksanakan pada Program berikut :

1. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Program ini memiliki indikator Persentase lokasi pendampingan yang sudah melaksanakan kegiatan lingkungan hidup dengan target 6,46%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

- Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota memiliki indikator kegiatan :
 - a) Jumlah kader konservasi yang didampingi dengan target 55 Orang.
 - b) Jumlah Lembaga Masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan aktif dengan target 214 lembaga.

Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

- a. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
 - Masukan : Tersedianya dana sebesar 25.175.200,-
 - Keluaran : Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan
 - Target : 1 dokumen
- b. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
 - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 228.825.950,-

- Keluaran : Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH
- Target : 313 lembaga
- c. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
 - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 635.856.400,-
 - Keluaran : Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat
 - Target : 400 orang

D. Untuk menangani Isu Strategis Belum optimalnya pelayanan pengelolaan persampahan dilaksanakan melalui 2 program sebagai berikut :

1. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Program ini memiliki indikator Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah dengan target 29,41%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

- Kegiatan Pengelolaan Sampah dengan indikator Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah ditargetkan sebanyak 30,56%. Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:
 - a. Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah
 - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 683.407.500,-
 - Keluaran : Jumlah sampah yang terdaur ulang
 - Target : 38.170,68 ton/tahun
 - b. Penanganan sampah melalui pengangkutan
 - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 3.031.429.390,-
 - Keluaran : Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan
 - Target : 61.115,6 ton/tahun
 - c. Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
 - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp 3.031.429.390,-

- Keluaran : jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
 - Target : 60.385,60 ton/tahun
- d. Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah
- Masukan : Tersedianya dana sebesar 2.555.857.374,-
 - Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik
 - Target : 54 unit
- e. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
- Masukan : Tersedianya dana sebesar 648.177.733,-
 - Keluaran : Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat
 - Target : 1 kelompok

2. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

Program ini memiliki indikator Persentase infrastruktur persampahan yang sesuai standar dengan target 100%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

- Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Penambahan infrastruktur persampahan sejumlah 5 unit. Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:
 - i. Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
 - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 542.320.000,-
 - Keluaran : Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun
 - Target : 0,32 ton/hari

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini memiliki indikator Nilai Evaluasi AKIP dengan target 80,20 poin. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

8.1 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah memiliki indikator Persentase Pelaporan Aset Yang Tersusun Sesuai Aturan dengan target 100%. Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

- Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp 15.000.000,-
- Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Target : 1 laporan

8.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah memiliki indikator Persentase Pencairan Gaji Dan Tunjangan Asn Tepat Waktu dengan target 100%. Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 7.965.500,-
- Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Target : 2 laporan

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp 164.554.500,-
- Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Target : 4 dokumen

c. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp 6.637.833.528,-

- Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
- Target : 43 orang/bulan

7.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki indikator Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan target 100%. Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

- a. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp 2.352.000,-
 - Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
 - Target : 1 Dokumen
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 263.555.850,-
 - Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
 - Target : 4 paket
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp 25.006.500,-
 - Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
 - Target : 2 paket
- d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 49.999.450,-
 - Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
 - Target : 1 paket
- e. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 39.487.700,-
 - Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
 - Target : 2 paket

- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp 88.228.000,-
 - Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Target : 46 laporan

7.4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki indikator Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik dengan target 100%. Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp 41.560.000,-
 - Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
 - Target : 80 unit
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp 40.292.500,-
 - Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
 - Target : 1 unit
- ii. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 346.598.800,-
 - Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
 - Target : 26 unit

7.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki indikator Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah dengan target 100%. Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp 3.180.323.900,-
 - Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
 - Target : 36 Laporan
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp 961.823.200,-
 - Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
 - Target : 1 Laporan

7.6 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja PD Yang Tersusun Sesuai Aturan dengan target 100%. Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

- a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp 11.000.000,-
 - Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Target : 5 laporan
- d. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp 17.000.000,-
 - Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Target : 2 dokumen

TABEL 3.2
RANCANGAN RENJA SKPD TAHUN 2023 USULAN PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN INDIKATIF ANGGARAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA THN 2027			
			LOKASI	TARGET KINERJA		PAGU INDIKATIF		SUMBER DANA	TARGET KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase infrastruktur persampahan yang sesuai standar	Kab. Jombang	100	persen	542.320.000	APBD		100	persen	1.772.756.000
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penambahan infrastruktur persampahan	Kab. Jombang	5	unit	542.320.000	APBD		15	unit	1.772.756.000
1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	Kab. Jombang	0,32	ton/hari	542.320.000	APBD		0,64	ton/hari	1.772.756.000
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP	Kab. Jombang	80,2	Poin	11.892.581.518	APBD		80,3	Poin	17.691.947.468
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	Kab. Jombang	100	persen	28.000.000	APBD		100	persen	55.418.000
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Jombang	2	dokumen	17.000.000	APBD		2	dokumen	30.237.000
2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Jombang	5	laporan	11.000.000	APBD		5	laporan	25.181.000
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Kab. Jombang	100	persen	6.810.353.528	APBD		100	persen	10.953.073.468
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Jombang	43	orang/bulan	6.637.833.528	APBD		43	orang/bulan	10.663.693.468
2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Jombang	4	dokumen	164.554.500	APBD		4	dokumen	267.993.000
2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Jombang	2	laporan	7.965.500	APBD		2	laporan	21.387.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA THN 2027			
			LOKASI	TARGET KINERJA		PAGU INDIKATIF		SUMBER DANA	TARGET KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaporan aset yang tersusun sesuai aturan	Kab. Jombang	100	persen	15.000.000	APBD		100	persen	30.800.000
2.11.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Jombang	1	laporan	15.000.000	APBD		1	laporan	30.800.000
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pakaian Dinas Pegawai	Kab. Jombang	100	persen	0	APBD		100	persen	21.000.000
2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi	Kab. Jombang	1	paket	0	APBD		1	paket	21.000.000
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Jombang	100	persen	468.629.500	APBD		100	persen	856.468.000
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Jombang	1	paket	49.999.450	APBD		1	paket	84.091.000
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Jombang	2	paket	39.487.700	APBD		2	paket	73.924.000
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Jombang	4	paket	263.555.850	APBD		4	paket	480.915.000
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Jombang	2	paket	25.006.500	APBD		2	paket	58.138.000
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Jombang	1	dokumen	2.352.000	APBD		2	dokumen	2.588.000
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Jombang	46	laporan	88.228.000	APBD		46	laporan	156.812.000
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Jombang	100	persen	4.142.147.190	APBD		100	persen	5.164.081.000
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Jombang	36	laporan	3.180.323.990	APBD		36	laporan	4.138.200.000
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Jombang	1	laporan	961.823.200	APBD		1	laporan	1.025.881.000
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Kab. Jombang	100	persen	428.451.300	APBD		100	persen	632.107.000
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Jombang	1	unit	40.292.500	APBD		1	unit	44.322.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA THN 2027			
			LOKASI	TARGET KINERJA		PAGU INDIKATIF		SUMBER DANA	TARGET KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Jombang	26	unit	346.598.800	APBD		27	unit	488.125.000
2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Jombang	80	unit	41.560.000	APBD		80	unit	99.660.000
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penurunan Emisi GRK (kumulatif)	Kab. Jombang	97.705,64	Ton CO2 Eq	2.037.817.918	APBD		99.659,76	Ton CO2 Eq	4.425.263.000
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah aktivitas uji sampel dan pengelolaan laboratorium dalam mendukung kegiatan pencegahan pencemaran kerusakan lingkungan.	Kab. Jombang	2	kegiatan	1.554.216.068	APBD		4	kegiatan	3.780.110.000
		Jumlah aktivitas penyusunan dokumen status lingkungan hidup dalam mendukung kegiatan pencegahan pencemaran kerusakan lingkungan.	Kab. Jombang	1	kegiatan						
		Jumlah aktivitas rehabilitasi tanaman dalam mendukung kegiatan pencegahan pencemaran kerusakan lingkungan.	Kab. Jombang	1	kegiatan						
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kab. Jombang	3	dokumen	199.501.250	APBD		3	dokumen	542.513.000
2.11.03.2.01.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Jombang	68	lokasi	174.437.500	APBD		68	lokasi	140.087.000
2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Kab. Jombang	2	dokumen	207.150.000	APBD		2	dokumen	227.400.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA THN 2027			
			LOKASI	TARGET KINERJA		PAGU INDIKATIF		SUMBER DANA	TARGET KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Kab. Jombang	800	dokumen	973.127.318	APBD		850	dokumen	2.870.110.000
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1. Jumlah lokasi pemulihan LB3	Kab. Jombang	1	lokasi	483.601.850	APBD		1	lokasi	645.153.000
		2. Luas lahan yang ditangani untuk pemulihan pencemaran (Konservasi)	Kab. Jombang	1,491	ha		APBD		1,5	ha	
2.11.03.2.03.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kab. Jombang	1	kegiatan	94.311.500	APBD		1	kegiatan	157.350.000
2.11.03.2.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	Kab. Jombang	1	kegiatan	222.473.000	APBD		2	kegiatan	248.638.000
2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kab. Jombang	1	kegiatan	166.817.350	APBD		1	kegiatan	239.165.000
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Penambahan luas tutupan lahan	Kab. Jombang	0,1756	persen	7.470.119.200	APBD		0,1778	persen	8.480.581.145
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luasan tutupan RTH Perkotaan	Kab. Jombang	0,15	ha	7.470.119.200	APBD		1,5	ha	8.480.581.145
		Luasan tutupan RTH Taman KEHATI	Kab. Jombang	0,5	ha						
2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	1	unit	180.761.950	APBD		1	unit	198.838.145
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	12,67	ha	7.277.077.250	APBD		13,67	ha	8.268.235.000
2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Jombang	60	orang	12.280.000	APBD		60	orang	13.508.000
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap dokumen lingkungan	Kab. Jombang	100	persen	236.898.050	APBD		100	persen	272.651.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA THN 2027			
			LOKASI	TARGET KINERJA		PAGU INDIKATIF		SUMBER DANA	TARGET KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase rekomendasi teknis yang dinilai kelayakannya	Kab. Jombang	100	persen	236.898.050	APBD		100	persen	272.651.000
		2. Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	Kab. Jombang	80	persen		APBD		80	persen	-
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Kab. Jombang	3	dokumen	146.624.300	APBD		3	dokumen	161.285.000
2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Kab. Jombang	130	badan usaha	90.273.750	APBD		135	badan usaha	111.366.000
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lokasi pendampingan yang sudah melaksanakan kegiatan lingkungan hidup	Kab. Jombang	6,46	persen	889.857.550	APBD		7,62	persen	622.998.000
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Lembaga Masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan aktif	Kab. Jombang	214	lembaga	889.857.550	APBD		255	lembaga	622.998.000
		2. Jumlah kader Konservasi yang didampingi	Kab. Jombang	55	orang		APBD		55	orang	
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kab. Jombang	1	dokumen	25.175.200	APBD		1	dokumen	52.606.000
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat	Kab. Jombang	400	orang	635.856.400	APBD		240	orang	130.264.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA THN 2027			
			LOKASI	TARGET KINERJA		PAGU INDIKATIF		SUMBER DANA	TARGET KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Kab. Jombang	313	lembaga	228.825.950	APBD		354	lembaga	440.128.000
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase laporan penanganan pengaduan yang diterbitkan.	Kab. Jombang	100	persen	80.469.050	APBD		100	persen	90.472.000
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Kab. Jombang	100	persen	80.469.050	APBD		100	persen	90.472.000
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Kab. Jombang	40	pengaduan	80.469.050	APBD		40	pengaduan	90.472.000
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	Kab. Jombang	3,04	persen	11.371.694.697	APBD		3,16	persen	15.138.833.500
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah	Kab. Jombang	30,56	persen	11.371.694.697	APBD		30,76	ton/tahun	15.138.833.500
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kab. Jombang	1	kelompok	648.177.733	APBD		1	kelompok	897.886.000
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Kab. Jombang	12	unit	0	APBD		11	unit	10.665.196.845
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Kab. Jombang	61.115,6	ton	4.448.759.450	APBD		61.816	ton	5.696.415.500

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA THN 2027			
			LOKASI	TARGET KINERJA		PAGU INDIKATIF		SUMBER DANA	TARGET KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Kab. Jombang	54	unit	2.555.857.374	APBD		56	unit	3.772.708.000
2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	Kab. Jombang	38.170,68	ton	683.407.500	APBD		41.470	ton	1.087.324.000
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Kab. Jombang	60.385,60	ton	3.035.492.640	APBD		61.086	ton	3.684.500.000
JUMLAH						34.521.757.983					48.495.502.113

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen ini menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup dan menjadi pedoman pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Jombang secara tepat dan terencana sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Demikian Rencanan Kerja ini disusun dengan harapan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang pengelolaan lingkungan hidup, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan tahun 2025 dapat tercapai.

Jombang, Agustus 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JOMBANG



MIPTAHUL ULUM, S.T, M.Si
Pembina Tingkat 1
NIP. 19710117 200112 1 003